**BAB II**

**LANDASAN TEORETIS**

**A. Pertumbuhan Ekonomi**

**1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi memiliki arti sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dari periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat disebabkan karena faktor-faktor produksi (modal, tenaga kerja dan teknologi) yang akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal (*capital stock*), teknologi yang semakin berkembang dan jumlah tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dengan pengalaman kerja dan pendidikan yang menambah keterampilan mereka.[[1]](#footnote-1)

Arsyad berpendapat bahwa, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.[[2]](#footnote-2)

Selain pengertian di atas, berbagai literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan perekonomiandi suatu negara sering kali dinyatakan dalam bentuk peresentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.[[3]](#footnote-3)

Sedangkan pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Dengan menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan, pengaruh perubahan harga (inflasi) telah dihilangkan sehingga nantinya angka yang muncul adalah total *output* barang dan jasa.[[4]](#footnote-4) Laju pertumbuhan PDRB menggambarkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan demikian pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dalam kurun waktu tertentu, biasanyasatu tahun. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya mendorong aktivitas perekonomian dapat dinilai efektifitasnya.[[5]](#footnote-5)

**2. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

**2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Teori pertumbuhan ekonomi Klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menjelaskan bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangannya sendiri tanpa perlu adanya banyak campur tangan dari pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian.[[6]](#footnote-6) Menurut pandangan ahli ekonomi Klasik, terdapat beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dari beberapa faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi tersebut, para ahli ekonomi Klasik menitikberatkan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Maka pertumbuhan ekonomi dengan melihat hukum pertambahan hasil yaitu apabila penduduk sedikit maka produksi marjinal akan semakin tinggi dari pada pendapatan per-kapita, sehingga pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per-kapita. Apabila pertambahan penduduk semakin banyak, yaitu pada titik tertentu akan menyebabkan penurunan produksi marjinal, sehingga mengakibatkan pada pendapatan per-kapita yang menurun.[[7]](#footnote-7) Hal tersebut didukung oleh beberapa pernyataan dari para ahli ekonom Klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Adam Smith berpendapat bahwa, pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk maka akan terjadi pula pertambahan *output*. Sedangkan menurut David Ricardo,faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah yang mengakibatkan upah menurun dan hal ini akan menurunkan pula kesejahteraan hidup masyarakat akhirnya perekonomian akan mengalami keadaan yang statis/mandeg.[[8]](#footnote-8)

**2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik**

Pertumbuhan ekonomi Neo Klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (modal, tenaga kerja dan teknologi),[[9]](#footnote-9) maka fungsi produksi agregat standar yang dipakai adalah sebagai berikut:

Y = Aeμt . Kα . L1-α

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

eμt = melambangkan tingkat kemajuan teknologi

α = melambangkan elastisitas output terhadap model, yakni persentase vbhn.

Teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional mengemukakan bahwa pertumbuhan *output* bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor produksi yaitu dengan kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan kemajuan teknologi.[[10]](#footnote-10)

**2.3 Teori Harrod-Domar**

Teori Harrod-Domar ini melengkapi Teori Keynes, jika dalam Teori Keynes melihat dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan teori Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar ini didasarkan pada asumsi:

1. Perekonomian bersifat tertutup,

2. Hasrat menabung (MPS=S) adalah konstan

3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).

4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan asumsi di atas Harrod Domar melakukan analisis dan membuat kesimpulan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap dapat dicapai jika terpenuhinya syarat-syarat keseimbangan yaitu :

G = k = n

G = Growth (tingkat pertumbuhan *output*)

k = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar didapatkan keseimbangan, maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkandan peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital output = rasio modal output*).[[11]](#footnote-11)

Harrod-Domar berpendapat bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap permintaan maupun penawarandan dalam jangka panjang, investasi akan menyebabkan kenaikan stock barang modal (*capital stock*) seperti jalan, pabrik dan lain-lain. Dalam suatu perekonomian, investasi memiliki peranan yang penting karena dalam setiap tambahan investasi akan menyebabkan kenaikan dalam jumlah *output* yang diproduksi.[[12]](#footnote-12)

**B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

**1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.[[13]](#footnote-13)

PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung pada menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu.[[14]](#footnote-14)

**2. PerhitunganProduk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

1. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
2. pengeluaran konsumsi pemerintah
3. pembentukan modal tetap domestik bruto
4. perubahan inventori, dan
5. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.[[15]](#footnote-15)

**C. Investasi**

**1. Pengertian Investasi**

Secara filosofis, investasi atau penanaman modal diarikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah. Sedangkan dalam pengertian ekonomi investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan stok barang modal (*capital modal*) dalam periode tertentu.[[16]](#footnote-16)

Investasi juga dapat di definisikan sebagai kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini (sekarang, *present*) dengan harapan mendapatkan manfaat (dikemudian hari, *future*).[[17]](#footnote-17)

Adapun faktor-faktor yang menjadi penentu tingkat Investasi,[[18]](#footnote-18) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
2. Suku Bunga
3. Ramalan keadaan ekonomi masa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.
7. **Macam-macam Investasi**

Berdasarkan karakteristik (sifat dan pelaku),[[19]](#footnote-19) Investasi atau penanaman modal terbagi dua yaitu :

1. Investasi Publik (*Public Investment*) merupakan investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, yang digunakan untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Investasi publik atau *public investment* ini bersifat nirlaba atau non profit motif, contohnya seperti pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya.
2. Investasi Swasta (*Private Investment*) dapat diartikan sebagi investasi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya perusahaan, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini juga dikenal dengan istilah investasi dengan profit motif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pasal 1 ayat 2 Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan pemanaman modal asing menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pasal 1 ayat 3 diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pasal 3 ayat 2 Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. Menciptakan lapangan kerja;

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[[20]](#footnote-20)

1. **Pengeluaran Pemerintah**
2. **Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Pemerintahatau disebut juga Belanja Pemerintah merupakan pembelian barang konsumsi dan barang modal.[[21]](#footnote-21) Pengeluaran konsumsi pemerintah berdasarkan Badan Pusat Statistik, diartikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi pemerintah).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya peran pemerintah maupun peran pihak swasta. Selain itu pengeluaran pemerintah juga digunakan sebagai penentu jumlah pengeluaran aggregat maupun penentu Pertumbuhan GNP riil dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa dibagi menjadi dua kelompok yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah, yang termasuk kedalam golongan konsumsi pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang akan dikonsumsikan, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas serta digunakan untuk membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan yang termasuk investasi pemerintah adalah pengeluaran yang digunakan untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi.[[22]](#footnote-22)

**2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah, [[23]](#footnote-23) adalah sebagai berikut:

Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Salah satu faktor utama yang digunakan dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah, maka terlebih dahulu yang harus dibuat adalah proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka akan semakin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang dilakukan.

Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Beberapa tujuan terpenting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah tingkat pengangguran, menghindari tingginya tingkat inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang serta pembangunan infrastruktur. Cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sering sekali pemerintah membelanjakan uang jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima dari pajak sehingga untuk membiayainya pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang.

Pertimbangan politik dan keamanan

kekacauan politik, perselisihan antara berbagai golongan masyarakat dan derah sering terjadi di berbagai belahan dunia. Keadaan seperti itu akan mengakibatkan pada kenaikan pengeluaran pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menyebabkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan memaksa pemerintah untuk membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak.

**E. Tenaga Kerja**

**1. Pengertian Tenaga Kerja**

Mulyadi berpendapat bahwa tenaga kerja (*man power*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut[[24]](#footnote-24). Sedangkan definisi tenaga kerja yaitu menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.[[25]](#footnote-25)

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk diluar usia yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiun, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Sedangkan berdasarkan batas kerja, penduduk di bagi menjadi dua yaitu :

1. Angkatan kerja

Angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak sedang bekerja dan pengangguran.[[26]](#footnote-26)

1. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak [sekolah](https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah" \o "Sekolah) dan [mahasiswa](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa" \o "Mahasiswa), para [ibu rumah tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_rumah_tangga" \o "Ibu rumah tangga) dan orang [cacat](https://id.wikipedia.org/wiki/Cacat" \o "Cacat), serta para [pengangguran](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran) sukarela.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu negara/daerah.[[27]](#footnote-27) Jumlah tenaga kerja yang berpendidikan serta yang memiliki keahlian tertentu (*skill*) juga akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas dalam masyarakat.

**F. Hubungan Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dalam pengertian ekonomi, investasi diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan stok barang modal (*capital modal*) dalam periode tertentu.[[28]](#footnote-28) Teori Harrod-Domar yang merupakan perkembangan dari teori Keynes menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya bisa tercapai apabila terpenuhinya syarat-syarat keseimbangan. Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan dan investasi harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, teori ini menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau sebagai penentu perkembangan tingkat PDRB suatu di daerah.

Sukirno berpendapat bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan tersebut bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi,[[29]](#footnote-29) yaitu:

* 1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
  2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
  3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Selain itu investasi atau disebut juga penanaman modal merupakan langkah awal dari kegiatan produksi, dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi serta mencerminkan marak lesunya pembangunan.[[30]](#footnote-30) Luntungan juga berpendapat, bahwa investasi dapat memperbesar kapasitas produksi yang kemudian akan meningkatkan PDRB di suatu daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional.[[31]](#footnote-31)

**G. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegaranya, guna mencapai tujuan bernegara yakni untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya. Secara umum, tugas pemerintah dalam melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan publik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tugas di bidang ekonomi dan di luar bidang ekonomi.[[32]](#footnote-32)

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu tugas di bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian disuatu negara,dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Besarnya pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan pada peningkatan PDRB di suatu daerah, karena peningkatan *aggregat demand* akan mendorong kenaikan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi.[[33]](#footnote-33)

**H. Hubungan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Selain investasi dan pengeluaran pemerintah komponen lain yang berperan dalam meningkat atau menurunnya pendapatan nasional adalah faktor tenaga kerja. Penggunaan tambahan tenaga kerja pada tingkat tertentu akan menyebabkan tambahan output produksi yang kemudian akan menaikkan output nasional. Tanpa adanya peran tenaga kerja maka kegiatan produksi tidak akan berjalan, namun penggunaan tenaga kerja yang tidak memadai juga dapat mengganggu jalannya proses produksi sehingga output produksi akan menurun, hal ini akan menurunkan tingkat konsumsi dan mengakibatkan penurunan tingkat investasi, bila tingkat investasi rendah pada akhirnya akan membuat kegiatan perekonomian menjadi lesu.

Datrini berpendapat bahwa faktor tenaga kerja merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Laju pertumbuhan investasi akan menentukan pertumbuhan tenaga kerja, selanjutnya pertumbuhan tenaga kerja akan menentukan besarnya pertumbuhan output.[[34]](#footnote-34)

**I. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Studi tentang Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regoinal Bruto (PDRB) telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Secara ringkas disajikan ringkasan penetian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dan inspirasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan olehAhmad Jazuli Rahman dkkpada 2016 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Propinsi Banten Tahun 2010-2014.[[35]](#footnote-35) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara serentak investasi, pengeluaran pemerintan dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB). Sedangkan hasil uji parsial menunjukan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB). Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti mengunakan variabel investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja sebagai variabel bebas dan PDRB sebagai variabel terikat serta tempat penelitian yang di gunakan sama yakni Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Perbedaan penelitian ini adalah jangka waktu penelitian yang digunakan, bila penelitian ini diteliti dalam kurun waktu tahun 2010-2014 maka peneliti meneliti hingga tahun selanjutnya yakni dari tahun 2010-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Linda Sitompul pada tahun 2007 dengan judul Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatra Utara.[[36]](#footnote-36) Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sumatra Utara dipengaruhi tiga sektor utama yaitu, sektor pertanian, sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatra Utara. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa investasi PMDN tahun sebelumnya, PMA tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatra Utara. Secara parsial, hasil analisis menunjukan bahwa PMDN tahun sebelumnya, investasi PMA tahun sebelumnya dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sumatra Utara, sedangkan kondisi perekonomian tidak berpengaruh signifikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan yakni variabel investasi, tenaga kerja dan PDRB sedangkan perbedaannya peneliti menggunakan variabel pengeluaran pemerintah sebagai variabel bebas yang mempengaruhi PDRB, selain itu waktu yang di gunakan serta tempat studi yang di gunakan berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustiono dengan Judul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008.[[37]](#footnote-37) Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkanperbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis dan memberi arahyang negatif. Persamaanya adalah peneliti mengunakan variabel investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja sebagai variabel bebas dan PDRB sebagai variabel terikat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jangka waktu dan tempat studi yang di gunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Eddy Wibowo Candra pada tahun 2012 yang berjudul Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010.[[38]](#footnote-38) Hasil dari penelitian menunjukkan variabel independent yaitu pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak mempunyai hubungan dengan variabel dependent yaitu pertumbuhan ekonomi. Kecuali pertumbuhan ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tenaga kerja. Selain itu variabel independent berpengaruh positif dan signifikan kecuali variabel penanaman modal dalam negeri yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaannya adalah variabel yang digunakan sama yakni pengeluaran pemerintah, tenaga kerja. Sedangkan perbedaanya pada investasi data yang digunakan penelitian sebelumnya hanya data PMDN saja. Selain itu tempat studi dan jangka waktu yang digunakan peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

**G. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.[[39]](#footnote-39) Hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ho = | Diduga Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. |
|  | Ha = | Diduga Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. |
| 2. | Ho = | Diduga Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. |
|  | Ha = | Diduga Investasi berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. |
| 3. | Ho = | Diduga Pengeluaran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. |
|  | Ha = | Diduga Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. |
| 4. | Ho = | Diduga Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. |
|  | Ha = | Diduga Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. |

1. Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 9-10. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2010), 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*  (Jakarta: Kencana 2011), 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banten: Baraka Aksara, 2013), 79. [↑](#footnote-ref-4)
5. Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah,” (Tesis Magister, Program Pacasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), 10. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan,* 244. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan,*433. [↑](#footnote-ref-7)
8. Batari Saraswati Karlita, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri di Kota Semarang Tahun 1993-2010” (Skripsi Universitas Diponegoro*,* 2013), 28. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi 3*, 437. [↑](#footnote-ref-9)
10. Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah”, 13. [↑](#footnote-ref-10)
11. Robinson Taringan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 49. [↑](#footnote-ref-11)
12. Eddy Wibowo Candra, “Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010*” Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya,* 2012, 6. [↑](#footnote-ref-12)
13. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Menurut Pengeluaran 2011-2015* (Banten: CV. Dharmaputra, 2016), 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. Robinson Taringan, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 21. [↑](#footnote-ref-14)
15. Badan Pusat Statistik, *Metodologi; Perhitungan Angka-angka PDRB*, diakses dari https://www.bps.go.id/, pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 10.33. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 45. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 444. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi 3*, 122. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* , 451-452. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial,* 426. [↑](#footnote-ref-21)
22. Eddy Wibowo Candra, “*Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi jawa Timur Tahun 2001-2010”*, 7. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi 3*, 168-169. [↑](#footnote-ref-23)
24. S.Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 59. [↑](#footnote-ref-24)
25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. [↑](#footnote-ref-25)
26. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Provinsi Banten dalam Angka 2017* (Banten: CV. Dharmaputra, 2017), 54. [↑](#footnote-ref-26)
27. Batari Saraswati Karlita, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap PDRB Sektor Industri di Semarang Tahun 1993-2010*”,* 21. [↑](#footnote-ref-27)
28. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 45. [↑](#footnote-ref-28)
29. Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah”, 29. [↑](#footnote-ref-29)
30. Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), 132. [↑](#footnote-ref-30)
31. Batari Saraswati Karlita, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri di Semarang Tahun 1993-2010*”,* 34. [↑](#footnote-ref-31)
32. Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial,*472. [↑](#footnote-ref-32)
33. Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah”, 34-35. [↑](#footnote-ref-33)
34. Batari Saraswati Karlita, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap PDRB Sektor Industri di Semarang Tahun 1993-2010*”,* 35. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ahmad Jazuli Rahman, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2010-2014” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.14, No.02, Desember, 2016, 113. [↑](#footnote-ref-35)
36. Novita Linda Sitompul,” Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatra Utara,” (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan Juni 2007), 1. [↑](#footnote-ref-36)
37. Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah”, 1. [↑](#footnote-ref-37)
38. Eddy Wibowo Candra, “Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010*”,* 1. [↑](#footnote-ref-38)
39. Riduwan, *Pengantar Statistika Sosial* (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), 138. [↑](#footnote-ref-39)